

## **BAB I PENDAHULUAN**

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amana. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan



Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur No. 80 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
  3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;
  5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
  6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Struktur Organisasi**

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut:

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas.

#### **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi

dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1.A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program;
- 1.B. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- 1.C. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- 1.D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Subbagian Program:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

2. Subbagian Keuangan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.



### C. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan rencana dan program Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahkan:

1. Seksi Bina Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil, meliputi:

- Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan tata ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;



- Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa, dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi;
- Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi;
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi, pengendalian ekosistem dan sumberdaya kelautan, meliputi:

- Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
- Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi, rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi;



- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi dan lingkungan sumberdaya ikan di wilayah kewenangan provinsi;
- Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan jasa kelautan, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan;
- Pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan perijinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi;
- Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

#### **D. Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap, sarana perikanan tangkap dan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perikanan tangkap;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

1. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap, meliputi:

- Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;
- Penetapan petunjuk pembangunan tipe pelabuhan perikanan, penyusunan data fasilitas pelabuhan perikanan Jawa Tengah (fasilitas pokok, fungsional dan penunjang);
- Penetapan petunjuk pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah;
- Inventarisasi data kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan analisa data kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Usulan rencana pengembangan pelabuhan perikanan jangka pendek dan jangka panjang;
- Penyusunan rencana pembangunan pelabuhan perikanan;
- Evaluasi pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Inventarisasi dan evaluasi lokasi pelabuhan perikanan yang akan diidentifikasi;
- Usulan tata cara identifikasi pembangunan pelabuhan perikanan;
- Analisis dan evaluasi kegiatan identifikasi pengembangan pelabuhan perikanan;
- Analisis dan evaluasi usulan rencana induk pengembangan pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Analisis lokasi / *site* pelabuhan perikanan yang akan dibangun;
- Usulan kerangka acuan studi kelayakan dan studi teknis pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep tata cara pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;



- Penyusunan bahan supervisi pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan analisa dan evaluasi studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep usulan pentahapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan;
- Usulan kerangka acuan rancang bangun pelabuhan perikanan;
- Usulan tata cara pelaksanaan pembuatan rancang bangun pelabuhan perikanan yang akan dibangun;
- Penyusunan bahan supervisi pelaksanaan pembuatan rancang bangun pembangunan pelabuhan perikanan;
- Analisis dan evaluasi hasil pembuatan rancang bangun pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep rencana pentahapan pelaksanaan konstruksi pelabuhan perikanan;
- Bimbingan pelaksanaan rancang bangun pelabuhan perikanan;
- Pengumpulan data/informasi serta penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan laporan hasil pembangunan pelabuhan perikanan;
- Pemantauan pelaksanaan pelayanan teknik pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan petunjuk persiapan operasional pelabuhan perikanan;
- Usulan bimbingan pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan;
- Evaluasi dan analisis kegiatan operasional pelabuhan perikanan;
- Usulan tata cara kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep usulan perjanjian kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan informasi/data pembangunan dalam rangka promosi investasi dan kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- Pengusulan tata cara pemantauan operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep pelaporan pengelolaan pelabuhan perikanan;



- Pemantauan pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan.

2. Seksi Sarana Perikanan Tangkap:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perikanan tangkap, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
- Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT s.d. 30 GT;
- Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat tangkap ikan;
- Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
- Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT s.d. 30 GT;
- Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi;
- Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.

3. Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber daya Ikan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan, meliputi:

- Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi;
- Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota;
- Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi;
- Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi;



- Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.

## **E. Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, pengelolaan budidaya air payau dan laut, serta pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air payau dan laut;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:

### **1. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Tawar:**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan produk perikanan di air tawar;
- Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan air tawar;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air tawar;
- Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk /benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk per jenis, induk dasar dan benih alam air tawar;
- Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan air tawar;

- Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar;
- Pembinaan pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan air tawar;
- Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya air tawar.

2. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Payau dan Laut:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan produk perikanan di air payau dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk /benih ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk perjenis, induk dasar dan benih alam air payau dan laut;
- Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan air payau dan laut;
- Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan air payau dan laut;
- Pembinaan pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan air payau dan laut;
- Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya air payau dan laut.

3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
- Pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor-impor induk dan benih ikan;



- Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan air tawar;
- Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, peredaran dan/atau pemeliharaan ikan lintas kabupaten/kota;
- Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota;
- Koordinasi dan pengembangan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota;
- Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung (KJA) di perairan umum (PU) lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi;
- Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

## **F. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan**

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha perikanan, pengolahan hasil dan pemasaran, dan pengembangan SDM serta kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan Kelembagaan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi;
- Pemberian ijin penangkapan dan / atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT s.d. 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan skala menengah yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.

2. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan;
- Pelaksanaan kebijakan mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai dengan prinsip PMMT atau HACCP;
- Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan;

- Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya, serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
  - Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan;
  - Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan;
  - Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi;
  - Akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
  - Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.
3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan: Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan, meliputi:
- Penetapan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
  - Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan usaha kelautan dan perikanan di provinsi;
  - Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi;
  - Peragaan penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;
  - Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistikserta informasi bidang perikanan diwilayah laut kewenangan provinsi;
  - Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

### **G. UPTD- LPPMHP**

UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. **Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Semarang;**
- b. **Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Pekalongan;** dan
- c. **Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Cilacap.**

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan serta pengawasan pengolahan hasil perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-LPPMHP mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan pengujian mutu hasil perikanan;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana untuk pengujian mutu hasil perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

- a. Kepala Laboratorium;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian; dan
- d. Seksi Pengawasan Mutu.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Laboratorium;
- Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Laboratorium;
- Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Laboratorium; dan
- Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Laboratorium.

b) Seksi Pengujian

- Penyusunan rencana dan program kegiatan pengujian mutu hasil perikanan;
- Penyusunan perencanaan kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk program pengujian mutu hasil perikanan;
- Penyiapan dan pengumpulan data serta bahan untuk pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan;
- Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan secara mikrobiologi, organoleptik dan kimia;

- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan pengujian mutu terhadap produk pengolahan;
- Pemeliharaan dan perawatan, bahan kimia dan media pengujian;
- Pelaksanaan fungsi Manajerial Teknis sesuai SNI 19-17025-2000 (ISO Guide 17025) sebagai laboratorium terakreditasi; dan
- Pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar.

c) Seksi Pengawasan Mutu

- Pengumpulan dan inventarisasi data usaha pengolahan hasil perikanan tradisional maupun modern;
- Pelaksanaan pengawasan pada unit usaha pengolahan hasil perikanan tradisional dan modern;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala pada unit usaha pengolahan hasil perikanan tradisional dan modern;
- Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh pengujian; dan
- Pelaksanaan fungsi Deputy Manajerial Mutu sesuai SNI 19-17025-2000 (ISO Guide 17025) sebagai laboratorium terakreditasi.

## H. UPTD-PPP

Unit Pelaksana Teknis - PPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal;**
- b. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kab. Pati;**
- c. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak Kab. Demak;**
- d. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto Kab. Pekalongan;**
- e. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdayong Kab. Pemalang;**
- f. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor Kab. Batang;**
- g. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kab. Rembang;**
- h. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kab. Kendal; dan**
- i. **Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa Kab. Jepara.**

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayah kerjanya
2. Pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-PPP mempunyai fungsi :

1. Perencanaan pengembangan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
2. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan pelabuhan perikanan;
3. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan; dan
4. Melakukan pemberian pelayanan kapal dan keselamatan pelayaran, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

1. Kepala Pelabuhan;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Tata Pengusahaan; dan
4. Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- 1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup PPP;
- 3) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup PPP;
- 4) Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan PPP; dan
- 5) Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan PPP.

b) Seksi Tata Pengusahaan

- 1) Penyiapan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan;
- 2) Pemeliharaan sarana pelayaran;
- 3) Pelayanan jasa;
- 4) Pengelolaan keamanan;

- 5) Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan;
  - 6) Pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan; dan
  - 7) Koordinasi pengawasan penangkapan dan mutu hasil perikanan.
- c) Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran
- 1) Perencanaan pengembangan pemeliharaan, serta pemanfaatansarana pelabuhan perikanan;
  - 2) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan berupa penerbitan surat ijin berlayar (SIB);
  - 3) Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
  - 4) Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
  - 5) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemrosesan hasil perikanan;
  - 6) Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
  - 7) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta statistik perikanan;
  - 8) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya;
  - 9) Pemanfaatan wilayah pesisir dan fasilitas Wisata Bahari; dan
  - 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **I. UPTD-Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan (BBI)**

Unit Pelaksana Teknis-BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. **Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar**
- b. **Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut**

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan perbenihan dan budidaya ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BPBI mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan budidaya ikan;
3. Pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat;
4. Penyediaan benih dan calon induk ikan unggul;
5. Pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya ikan;
6. Penyediaan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
7. Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan;
8. Pelaksanaan sertifikasi benih dan induk ikan unggul;
9. Pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan pengembangan budidaya ikan;
10. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan
11. Pengelolaan ketatausahaan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Teknis; dan
4. Seksi Standarisasi dan Informasi.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- 1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Balai;
- 3) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Balai;
- 4) Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Balai; dan
- 5) Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Balai.

b) Seksi Pelayanan Teknis

- 1) Pelaksanaan identifikasi pasar/permintaan benih/induk;
- 2) Perencanaan komoditas yang diproduksi secara kualitatif/ kuantitatif;
- 3) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana produksi;
- 4) Penyusunan panduan mutu;

- 5) Pelaksanaan proses produksi dengan mentaati panduan mutu;
  - 6) Pelaksanaan audit internal produksi;
  - 7) Pelaksanaan proses sertifikasi; dan
  - 8) Pelaksanaan pembinaan pembenihan dan budidaya.
- c) Seksi Standarisasi dan Informasi
- 1) Identifikasi teknologi perbenihan dan budidaya;
  - 2) Pelaksanaan kaji terap teknologi;
  - 3) Perumusan hasil kaji terap;
  - 4) Sosialisasi pengembangan teknologi;
  - 5) Pembinaan pengembangan teknologi di kabupaten/kota; dan
  - 6) Perumusan standar teknologi.

## **J. Balai Karantina dan Kesehatan Ikan**

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit serta karantina ikan dalam rangka melindungi sumberdaya ikan dan lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BKKI mempunyai fungsi :

1. Mengupayakan pencegahan masuk dan keluarnya hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu;
2. Melakukan pengawasan keluar-masuknya ikan;
3. Melakukan pemeriksaan keluar-masuknya ikan;
4. Standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; dan
5. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang karantina dan kesehatan ikan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengawasan; dan
4. Seksi Pengujian.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

### a) Subbagian Tata Usaha

- 1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Balai;
- 3) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja;

bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Balai;

- 4) Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Balai; dan
- 5) Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Balai.

b) Seksi Pengawasan

- 1) Pelaksanaan pengendalian penyakit dan pengobatan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan peredaran pestisida, bahan kimia maupun obat-obatan yang digunakan kegiatan perikanan budidaya;
- 3) Penilaian kelayakan Laboratorium Hama Penyakit Ikan;
- 4) Monitoring dan *surveillance* Hama Penyakit Ikan;
- 5) Analisa resiko akibat hama penyakit ikan;
- 6) Pengawasan lalu lintas media pembawa hama penyakit ikan;
- 7) Monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan; dan
- 8) Pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat (petani, nelayan, siswa/mahasiswa, dll.).

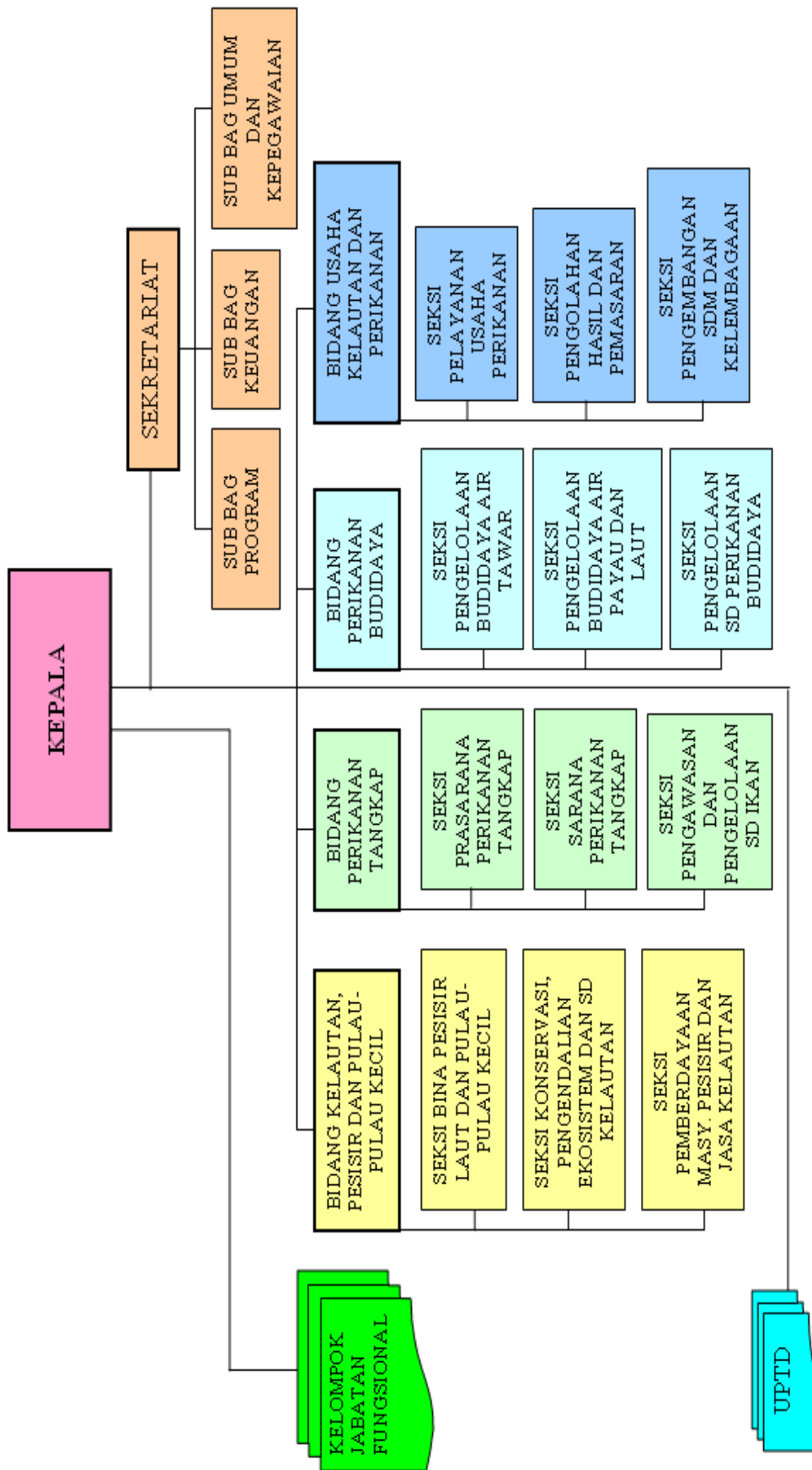
c) Seksi Pengujian

- 1) Penyusunan bahan informasi tentang Penyakit Ikan;
- 2) Visualisasi dan dokumentasi tentang Hama Penyakit Ikan;
- 3) Pengujian obat-obatan ikan;
- 4) Penelitian dan perekayasa di bidang pengendalian Hama Penyakit Ikan;
- 5) Penyusunan konsep naskah perundangan/kebijakan tentang Hama Penyakit Ikan;
- 6) Standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- 7) Sertifikasi kesehatan ikan;
- 8) Analisa dan evaluasi kerugian budidaya akibat Hama Penyakit Ikan;
- 9) Pemeriksaan penyakit ikan (virus, bakteri, parasit, jamur);
- 10) Analisa residu pestisida/obat-obatan dan bahan kimia lainnya; dan
- 11) Penyusunan laporan dan rencana kerja laboratorium.

## **K. Kelompok Jabatan Fungsional**

Sekretariat, Bidang-bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Usaha Kelautan dan Perikanan, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

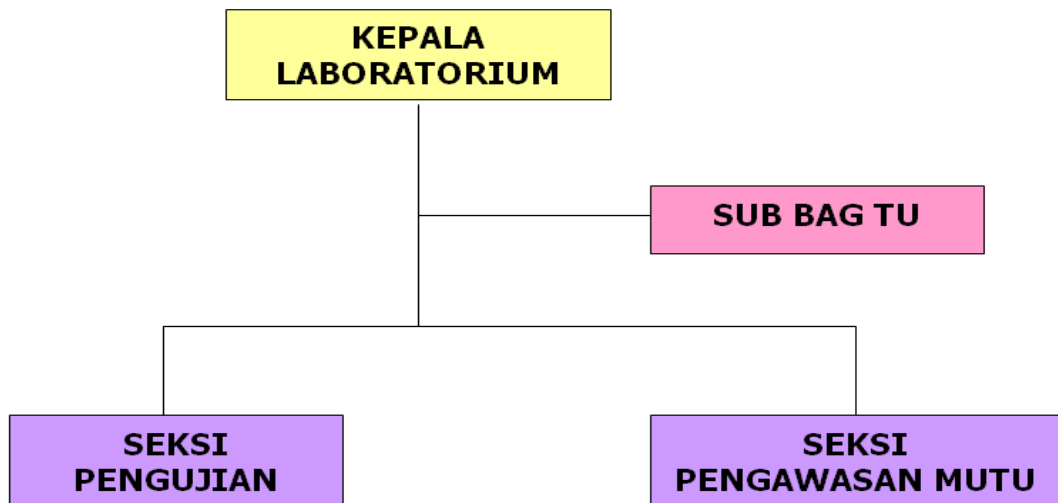
Untuk lebih lengkapnya perubahan-perubahan yang ada pada SOTK baru dapat dilihat pada gambar 1, 2, 3, 4, 5 di bawah ini :



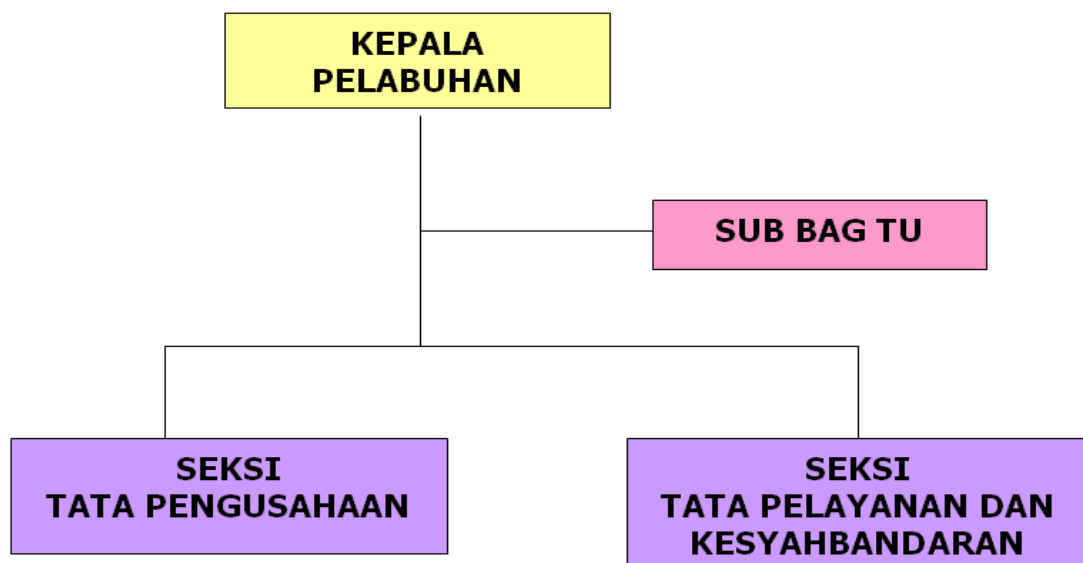
Gambar 2.1. BAGAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH



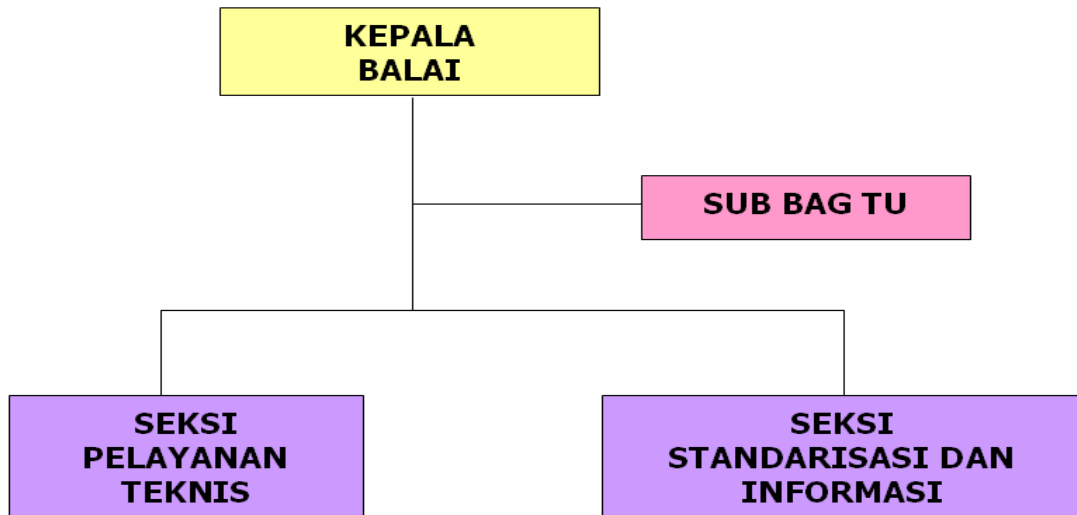
Gambar 1.2. Bagan Organisasi UPT Lab. Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



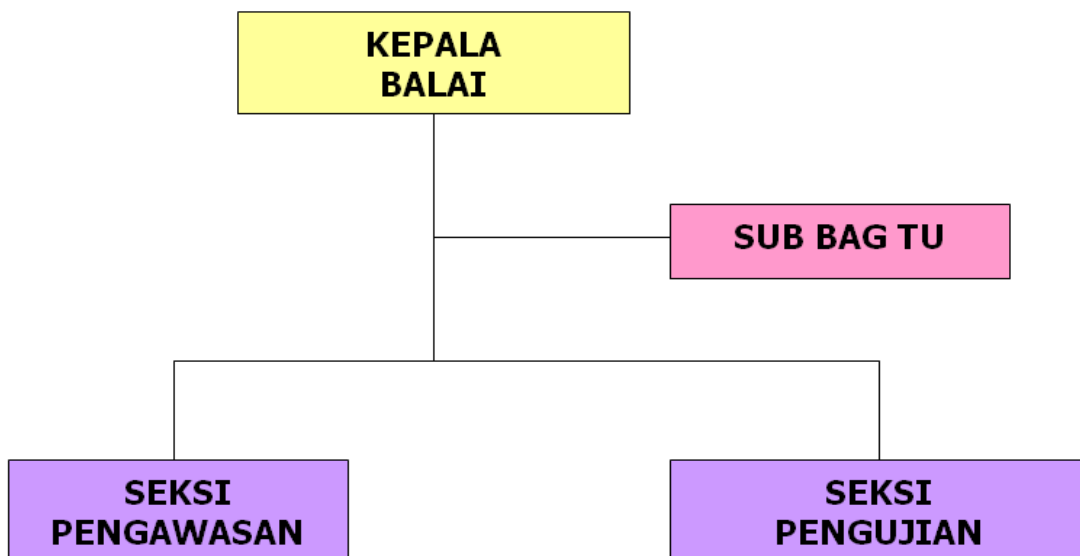
Gambar 1.3. Bagan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.4. Bagan Organisasi UPT Balai Pembenihan dan Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.5. Bagan Organisasi UPT Balai Karantina dan Kesehatan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 379 orang personel (Data sampai Desember 2010). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	SD	27 orang	
2.	SMP	18 orang	
3.	SMU	171 orang	
4.	Sarjana Muda / D3	24 orang	
5.	Sarjana / D4 / S1	93 orang	
6.	Pasca Sarjana / S2	45 orang	
7.	Doktor / S3	1 orang	
	JUMLAH	379 orang	

Peran seperti tersebut di atas secara umum telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil yang baik karena keberhasilannya dalam penerapan manajemen instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi secara efisien. Strategi yang menyeluruh dengan memperhatikan seluruh faktor di lingkungan internal maupun eksternal dibutuhkan untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Sebagai proses penetapan keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik, strategi merupakan perwujudan dari koordinasi dalam implemementasi kegiatan-kegiatan tersebut. Koordinasi dan komunikasi akan mencairkan kebekuan dan kebuntuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang kompleks. Implementasi koordinasi menjadi lebih sulit dengan adanya ego sektoral, prioritas alokasi sumberdaya dan lain-lain.

Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkementingan (*stakeholders*). Dengan penguasaan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar. Penyampaian informasi secara tertulis, periodik dan melembaga mutlak diperlukan sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah dalam mengungkapkan dan mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan latar belakang tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010.

## **BAB II**

# **RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIK**

Perencanaan Strategik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2008 – 2013, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategik ( RENSTRA ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, baik di jajaran structural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program, proyek dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

#### **1. VISI**

Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan mempunyai visi, yaitu :

***"Terwujudnya sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber utama penghidupan, pendapatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan"***

#### **2. MISI**

Disamping mempunyai visi dalam rangka melaksanakan Pembangunan Perikanan sebagaimana tersebut diatas, juga mempunyai Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia serta mendorong dan meningkatkan peran pelaku-pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan (M1);

2. Meningkatkan dan menjaga daya dukung lahan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan (M2);
3. Mengembangkan alternatif pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan (M3);
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif (M4);
5. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan (M5);
6. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan (M6);
7. Peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus pemasaran produk serta jasa kelautan (M7);
8. Peningkatan dan penguatan sistem informasi kelautan dan perikanan meliputi distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta potensi pasar (M8); dan
9. Memberdayakan sosial ekonomi (M9).

### 3. NILAI-NILAI

Nilai-nilai yang dianut dan digunakan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan (2008 – 2013) terangkum dalam akronim **BERICHTIAR**, yaitu: **Brilliant** (N1), **Emphaty** (N2), **Respect** (N3), **Innovative** (N4), **Commitment** (N5), **Honesty** (N6), **Togetherness** (N7), **Integrity** (N8), **Assist** (N9) dan **Responsive** (N10)

- a. **Brilliant**, yaitu selalu berpikir cerdas dalam bekerja
- b. **Emphaty**, yaitu berperilaku santun, memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain
- c. **Respect**, yaitu saling menghormati serta menghargai terhadap sesama
- d. **Innovative**, yaitu selalu mengedepankan inovasi baru, mau dan mampu mengadakan pembaharuan sesuai tantangan
- e. **Commitment**, yaitu selalu berpegang teguh dalam menjalankan tugas
- f. **Honesty**, yaitu selalu jujur dalam bertugas
- g. **Togetherness**, yaitu menjunjung tinggi rasa kebersamaan, saling menghormati dan saling menghargai
- h. **Integrity**, yaitu menjunjung integritas dan moralitas dalam berkarya
- i. **Assist**, yaitu saling tolong menolong dan bekerjasama berdasarkan persahabatan atau kooperatif
- j. **Responsive**, yaitu responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi

#### 4. TUJUAN DAN SASARAN DINAS

Pembangunan kelautan dan perikanan Jawa Tengah dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan ( 2008 - 2013 ) dengan memperhatikan analisis pemecahan masalah, diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan, dengan mengacu pada visi, misi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

##### **Misi 1 :**

**Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta mendorong dan meningkatkan peran pelaku-pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan;**

##### **Tujuan 1 :**

Mengembangkan keterampilan dan keahlian pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan, dengan **sasaran:**

1. Terlaksananya pelatihan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan teknis budidaya ikan,
2. Terlaksananya pelatihan penggunaan alat tangkap,
3. Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan,
4. Terhasilkannya produk-produk perikanan berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor,
5. Terlaksananya pemberdayaan perempuan pesisir, taruna nelayan dan petani garam.

##### **Tujuan 2 :**

Mengembangkan keterampilan dan keahlian tenaga teknis Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan **sasaran:**

1. Terlaksananya pelatihan tenaga teknis Dinlutkan melalui diklat dan kursus ketrampilan dan keahlian kerja,
2. Terjaminnya kualifikasi pemakaian barang inventarisasi yang ada untuk menunjang kegiatan Dinas.

##### **Misi 2 :**

**Meningkatkan dan menjaga daya dukung lahan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;**

##### **Tujuan 1 :**

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari, dengan **sasaran:**

1. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir (Kelompok Masyarakat Pengawas /POKMASWAS) dalam

- pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta merangsang tumbuhnya POKMASWAS baru,
2. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut, dan restocking jenis sumberdaya ekonomis penting untuk peningkatan kualitas ekosistem vital di pesisir dan laut,
  3. Terbentuknya *database* sebagai basis strategi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

### **Tujuan 2 :**

Meningkatkan manfaat sosial bidang Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat, dengan **sasaran**:

1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan,
2. Terwujudnya pengembangan aneka usaha dan jasa kelautan dan perikanan secara *sustainable*.

### **Misi 3 :**

**Mengembangkan alternatif pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan ;**

### **Tujuan 1 :**

Membangun *database* sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi alternatif pengusahaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan **sasaran**:

1. Terselenggaranya perbaikan data dan sistem informasi Kelautan,
2. Terselenggaranya Perbaikan Data Statistik Perikanan melalui Pelatihan **510** Petugas Pengumpul dan pengolah Datik Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan tingkat Kab./Kota.

### **Tujuan 2 :**

Memanfaatkan *database* sumberdaya bidang Kelautan dan Perikanan untuk tujuan ekonomi masyarakat, dengan **sasaran**:

1. Terbentuknya alternatif usaha di bidang penangkapan ikan,
2. Terbentuknya alternatif usaha di bidang budidaya perairan,
3. Terbentuknya alternatif usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,
4. Terbentuknya alternatif pengusahaan kelautan-perikanan lainnya, seperti tambak garam, aktivitas perempuan dan taruna pesisir, serta usaha-usaha lain yang tidak bertumpu pada eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

**Misi 4 :**

**Meningkatkan iklim usaha yang kondusif;**

**Tujuan 1 :**

Memperbaiki sistem data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan, dengan **sasaran:**

1. Teridentifikasinya kondisi dan potensi usaha di wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terjadinya peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan,
3. Terjadinya efisiensi pelayanan perijinan SIUP, dll di lingkungan Dinlutkan.

**Tujuan 2 :**

Membangun sistem regulasi dan payung hukum yang *powerfull*, dengan **sasaran:**

1. Terbangunnya minat investasi di bidang penangkapan ikan, budidaya perairan, pengolahan dan pemasaran Perikanan maupun jasa Kelautan.
2. Terhindarnya dari ancaman konflik antar kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan,
3. Terbangunnya kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi di sektor perikanan secara optimal dan bertanggung jawab,
4. Terbangunnya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil,
5. Terciptanya peningkatan peran aktif pelaku usaha perikanan (termasuk dalam aspek finansial, perbankan dan investasi),
6. Meningkatkan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien di bidang agribisnis

**Misi 5 :**

**Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;**

**Tujuan 1 :**

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, dengan **sasaran:**

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya,

2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya,
3. Peningkatan Pengembangan Kawasan: gurame, lele, patin, nila, kepiting, rumput laut, udang, paket budidaya agropolitan di Kawasan agropolitan,
4. Meningkatkan konsumsi makan ikan dan ekspor produk perikanan.

### **Tujuan 2 :**

Peningkatan produksi perikanan sebagai sektor unggulan, dengan **sasaran:**

1. Meningkatkan minat investasi dan bantuan pengelolaan wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terciptanya perbaikan data dan informasi produktivitas wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
3. Terjadinya peningkatan bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan,
4. Terjadinya peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan dan distribusi bahan pangan komoditas perikanan.

### **Tujuan 3 :**

Meningkatkan kualitas Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, dengan **sasaran:**

1. Terciptanya dukungan Anggaran APBD dan APBN yang tepat sasaran dan waktu,
2. Terbentuknya Payung Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan yang mengatur kebijakan kewenangan, aturan, petunjuk teknis dan pelaksanaan pengelolaan yang sesuai dengan kaidah otonomi daerah,
3. Terjaminnya Pengembangan / Peningkatan kemampuan SDM pengelola.

### **Misi 6 :**

**Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;**

### **Tujuan 1 :**

Meningkatkan kualitas lingkungan pesisir dan sumberdaya kelautan, dengan **sasaran:**

1. Terlaksananya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas ekosistem vital di pesisir dan laut,

2. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

**Tujuan 2 :**

Meningkatkan minat investasi dan bantuan pengelolaan wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan, dengan **sasaran:**

1. Terciptanya perbaikan data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terjadinya peningkatan bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan.

**Tujuan 3 :**

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola, dengan **sasaran:**

1. Terjadinya peningkatan kemampuan dan pendapatan nelayan,
2. Terjadinya peningkatan kemampuan dan pendapatan petani ikan,
3. Terjadinya peningkatan kemampuan dan pendapatan pengolah hasil perikanan dan pemasarannya,
4. Terjadinya peningkatan kemampuan teknis pegawai Dinlutkan.

**Misi 7 :**

**Peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus pemasaran produk serta jasa kelautan;**

**Tujuan 1 :**

Meningkatkan bimbingan investasi oleh seksi Pelayanan Usaha Perikanan Dinlutkan, dengan **sasaran:**

1. Tercapainya peningkatan bimbingan investasi, kerjasama dengan instansi terkait ( Lembaga Keuangan, BPM, dll ),
2. Tercapainya peningkatan Sosialisasi kepada pengolah dan pemasar, diikuti dengan pembinaan dan penegakan aturan.

**Tujuan 2 :**

Memperbaiki sistem data dan informasi produk perikanan serta jasa kelautan, dengan **sasaran:**

1. Teridentifikasinya kondisi dan potensi usaha di wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terjadinya peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan,

3. Terjadinya efisiensi pelayanan perijinan SIUP, dll di lingkungan Dinlutkan.

### **Misi 8 :**

**Peningkatan dan penguatan sistem informasi kelautan dan perikanan meliputi distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta potensi pasar;**

#### **Tujuan 1 :**

Memperbaiki dan meningkatkan sistem data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan, dengan **sasaran:**

1. Teridentifikasinya kondisi dan potensi usaha di wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terjadinya peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan,
3. Terjadinya efisiensi pelayanan perijinan SIUP, dll di lingkungan Dinlutkan.

#### **Tujuan 2 :**

Mewujudkan tingkat pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari, dengan **sasaran:**

1. Terlaksananya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas ekosistem vital di pesisir dan laut,
2. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan,
3. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan,
4. Terwujudnya pengembangan aneka usaha dan jasa kelautan dan perikanan secara *sustainable*.

### **Misi 9 :**

**Memberdayakan sosial ekonomi.**

#### **Tujuan :**

Membangun sistem pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya, dengan **sasaran:**

1. Tercapainya peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan dan pembudidaya ikan.
2. Terbangunnya minat investasi di bidang penangkapan ikan, budidaya perairan, pengolahan dan pemasaran Perikanan maupun jasa Kelautan.

3. Terhindarnya dari ancaman konflik antar kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan,
4. Terbangunnya kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi di sektor perikanan secara optimal dan bertanggung jawab,
5. Terbangunnya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil,
6. Terciptanya peningkatan peran aktif pelaku usaha perikanan (termasuk dalam aspek finansial, perbankan dan investasi).

## **5. SASARAN / TARGET**

Mengingat adanya kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2010 ini dimulai bulan Januari hingga Desember, maka sasaran pembangunan perikanan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2013 juga menyesuaikan waktu yang telah ditentukan, yaitu dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, sebagaimana sasaran di bawah ini

### **5.1. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan**

#### **5.1.1. Perikanan Tangkap**

Produksi perikanan tangkap diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 1,00 % per tahun, dimana diperkirakan pencapaian produksi perikanan laut pada tahun 2008 sebesar 195.808,11 ton dan pada tahun 2013 mencapai 205.796,29 ton.

#### **5.1.2. Perikanan Budidaya**

Produksi perikanan budidaya diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 6,62 % per tahun, dimana pada tahun 2008 produksi perikanan budidaya sebesar 128.705,80 ton dan pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 177.333,80 ton.

### **5.2. Ekspor Hasil Perikanan**

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2008 - 2013, volume ekspor hasil perikanan di Jawa Tengah diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 5,10 % per tahun, dimana pada tahun 2008 mencapai 17.794 ton dan pada tahun 2013 mencapai 22.819 ton.

### **5.3. Konsumsi Makan Ikan**

Dalam periode tahun 2008 - 2013, konsumsi makan ikan di Jawa Tengah diproyeksikan meningkat 2,40 % per tahun, dimana

pada tahun 2008 sebesar 15,83 % kg/kap hingga pada tahun 2013 mencapai 17,82 kg/kap.

Padahal menurut standar nasional konsumsi makan ikan sebesar 18 kg/kap (WIDYAKARYA NASIONAL PANGAN DAN GIZI, 1983). Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan terutama bagi golongan penduduk berpenghasilan rendah terus dilakukan dengan melalui pemberian paket-paket kolam ikan air tawar, paket budidaya ikan dalam karamba maupun usaha-usaha memasyarakatkan dan mempromosikan makan ikan.

## **6. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

### **6.1. STRATEGI**

Untuk mewujudkan tujuan, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Berdasar pada tujuan dan sasaran di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki strategi sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan peluang usaha masyarakat pesisir yang belum optimal seperti usaha garam rakyat, aktivitas perempuan pesisir dan taruna pesisir, dan kemungkinan pengenalan kegiatan usaha lain yang tidak bertumpu pada eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) Memanfaatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk berperan serta dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, menumbuhkan kelompok-kelompok baru dan membantu sarana kelengkapan operasionalnya, dengan tetap melakukan operasi pengawasan bersama aparat terkait;
- 3) Mengembangkan dan memasyarakatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, mendekatkan *fishing ground* dengan pembuatan rumpun tetap dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- 4) Mengembangkan usaha perikanan budidaya sesuai komoditas unggulan yang berbasis kawasan dan diminati pasar, dengan meningkatkan mutu hasilnya melalui penerapan *good aquaculture practices*;
- 5) Meningkatkan usaha pengolahan dan pemasaran yang masih tradisional dalam hal mutu produknya guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor, dengan tetap membina usahapengolahan dan pemasaran modern; dan
- 6) Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di laut / pesisir, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran-serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian

ekosistem/ lingkungan melalui pembinaan, pelatihan dan sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku.

## 6.2. KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan strategi tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada penyusunan program-program kerjanya 5 (lima) tahun ke depan memiliki kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat, utamanya masyarakat pesisir dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperbesar peran serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- 3) Melaksanakan optimalisasi usaha perikanan tangkap, memasyarakatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- 4) Peningkatan usaha perikanan budidaya dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan serta meningkatkan kemampuan teknis pembudidayaan ikan, terutama dalam penerapan *good aquaculture practices*;
- 5) Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan mutu produk, teknologi, sanitasi dan higienis agar dapat memenuhi persyaratan mutu ekspor maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri; dan
- 6) Rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut / pesisir baik dengan penanganan fisik maupun vegetasi serta meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem/lingkungan.

## 6.3. PROGRAM

Dari kebijakan yang telah ditetapkan di atas dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan sebagai berikut :

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan ikan dalam mutu dan jumlah yang cukup terjangkau bagi masyarakat melalui rehabilitasi/pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan produksi, produktivitas perbaikan distribusi

yang terkait dengan perikanan budidaya, dengan prioritas kegiatan adalah:

- 1) Optimalisasi dan Pengembangan Karantina dan Kesehatan Ikan
- 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar
- 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan
- 5) Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan
- 6) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan
- 7) Revitalisasi Perikanan Budidaya
- 8) Rintisan Pengembangan Budidaya Kepiting

### **PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**

Program ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kegiatan perikanan tangkap, melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan
- 2) Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan
- 3) Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap
- 4) Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman dan Statistik Perikanan Tangkap
- 5) Revitalisasi Perikanan Tangkap
- 6) Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah
- 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPP Tasikagung
- 8) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPP Bajomulyo
- 9) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan perikanan
- 10) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPP Karimunjawa
- 11) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPP Morodemak
- 12) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPP Tawang
- 13) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPP Klidanglor
- 14) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPP Wonokerto

- 15) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPP Asemtoyong
- 16) Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPP Tegalsari
- 17) Pendampingan Bantuan Kapal Perikanan Tangkap

### **PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya dalam rangka menunjang kemandirian pengelolaan perikanan. Program ini dilaksanakan melalui :

- 1) Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan perikanan
- 2) Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Pekalongan
- 3) Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap
- 4) Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan
- 5) Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan
- 6) Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang
- 7) Pengembangan Kawasan Perikanan
- 8) Pengembangan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Kelautan dan perikanan

### **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
- 4) Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Barang Milik Daerah
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan, Buku Perpustakaan, Penerbitan Buku Informasi dan Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Penyediaan Makanan Minuman
- 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah

### 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

#### **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah sesuai dengan analisis keadaan serta kebutuhan melalui pengembangan sistem informasi manajemen berbasis computerize, pengadaan sarana kantor pemerintah, pembangunan dan rehabilitasi prasarana gedung kantor pemerintahan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
- 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
- 7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
- 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kedokteran / Laboratorium
- 9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat
- 10) Pemeliharaan Rutin Ponton / Kendaraan di atas Air Tidak Bermotor
- 11) Rehabilitasi Gedung Kantor/UPTD/Balai
- 12) Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan UPT

#### **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan performance aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

#### **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumberdaya Manusia

- 3) Bimbingan Teknis Peningkatan Fungsi Kehumasan Hukum dan Kelembagaan

### **PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan perluasan jaringan para pembudidaya, nelayan, pengolah ikan dalam pengembangan usaha mereka masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pendidikan Kemasyarakatan

### **PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu garam dan terwujudnya kawasan konservasi perairan umum melalui pelatihan petani garam dan nelayan perairan pedalaman. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

### **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem pesisir sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelompok pelestari ekosistem pesisir tercapai. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut

### **PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari serta pemanfaatan sumberdaya bidang kelautan dan perikanan untuk tujuan ekonomi masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

### **KEGIATAN / ANGGARAN RUTIN**

#### **Belanja Tidak Langsung**

Anggaran yang tersedia dipergunakan untuk Gaji, Tunjangan Pokok, dan Tambahan Penghasilan bagi PNS.

## B. RENCANA KINERJA

Untuk pencapaian sasaran sesuai dengan program yang dapat dilihat dari indikator kinerja kegiatan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan. Pada tahun 2010 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan di dalam Program dan Kegiatan serta target sasaran (indikator kinerja) sebagai berikut :

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Budidaya sebagai berikut :

#### **1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar**

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Produksi Ikan di PBIAT Muntilan 1.541.850 ekor, PBIAT Janti 3.200.350 ekor, Satker Ambarawa 392.700 ekor dan Satker Ngrajek 2.190.500 ekor

#### **2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut**

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tercukupinya sarana dan prasarana operasional dan meningkatnya produktivitas Satker Dinas Kelautan dan Perikanan ( BPBIAPL Maribaya, PBIAP Sluke, PBIAP Karanganyar Tugu dan BBIL Karimunjawa)

#### **3) Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Produksi Penangkapan Ikan di perairan pedalaman di Jawa Tengah, meningkatnya produksi benih di Jawa Tengah dan meningkatnya kesejahteraan nelayan

#### **4) Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Produksi Ikan di Banjarnegara (60,70 ton), Purbalingga (1.391,77 ton), Wonogiri,Sragen (37,65 ton), Janti (920,97 ton), Salatiga (10,87 ton), Kendal

#### **5) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah berkurangnya residu logam berat dan penyakit pada ikan dan lingkungan budidaya serta meningkatnya kecepatan penanganan pengendalian penyakit ikan dan udang di 35 kab./kota

6) Optimalisasi dan Pengembangan Laboratorium Karantina dan Kesehatan Ikan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi laboratorium karantina dan kesehatan Ikan serta termonitornya penyakit ikan dan udang terutama di Satker wilayah BKKI

7) Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi lele di Wonosobo, Udang di Brebes, Demak, Pati, Rembang, Cilacap, Kebumen, Bandeng di Kendal, Kota Semarang, Kerapu di Tegal, Pemalang, meningkatnya produksi perikanan rakyat dan pengalihan usaha nelayan. Meningkatnya produksi perikanan budidaya : Laut (1.891,27 ton), Tambak (64.490,77 ton), Kolam (42.403,70 ton), Karamba (8.882,56 ton) dan Sawah (2.533,47 ton)

**PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program Pengembangan dan Penguatan Perikanan Tangkap sebagai berikut :

1) Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Pati (24.139,10 ton), Kota Tegal (20.799,73 ton), Kabupaten Tegal (388,81 ton), Pemalang (10.066,25 ton), Batang (18.469,86 ton), Kota Pekalongan (31.501,68 ton), Rembang (27.078,65 ton), Brebes (1.335,67 ton)

2) Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Kualitas Hasil Tangkapan di Kota Semarang (58,25 ton), Rembang (27.078,65 ton), Batang (18.469,86 ton), Jepara (5.862,69 ton)

3) Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Sumberdaya Perikanan Tangkap di Batang, Rembang (Jawa Tengah)

4) Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman dan Statistik Perikanan Tangkap

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas perikanan tangkap di Grobogan (341,12 ton), Sragen (1.899,46 ton), Boyolali (517,99 ton), Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo (71,05 ton), Wonogiri (115,35 ton)

5) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap (RPPK)

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas perikanan tangkap di Kota Pekalongan (31.501,68 ton), Kab. Pati (24.139,10 ton), Kab. Rembang (27.078,65 ton), Kab.Cilacap (8.360,48 ton), Kab. Kebumen (1.975,48 ton), Kota Semarang (58,25 ton), Kota Tegal (20.799,73 ton), Kab. Batang (18.469,86 ton), Kab. Purworejo (40,63 ton)

6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Laut

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Tasikagung Rembang, PPP Bajomulyo Juwana Pati, PPP Morodemak Demak, PPP Wonokerto Kab. Pekalongan, PPP Tawang Kendal, PPP Klidang Lor Batang, PPP Tegalsari Tegal, PPP Asem doyong Pemalang, PPP Karimunjawa Jepara

7) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan perikanan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan perikanan di Jawa Tengah

## **PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**

Indikator keberhasilan pada masing-masing kegiatan pada program pengembangan agribisnis :

1) Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perikanan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mematuhi peraturan sebanyak 250 orang. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif sebanyak 30 orang. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang perikanan di Jawa Tengah.

- 2) Peningkatan koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersusunnya program kerja yang baik sesuai dengan prioritas, meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan tersebarnya informasi kelautan dan perikanan.
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan perikanan  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan pengolah tradisional sebanyak 610 orang. Meningkatnya angka konsumsi makan ikan di Jawa Tengah menjadi 15 kg/kap/th.
- 4) Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang.
- 5) Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Pekalongan  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Pekalongan.
- 6) Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap.
- 7) Pengembangan Kawasan Perikanan  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengembangan Kawasan Perikanan dengan meningkatnya kemampuan para pengolah dan pembudidaya ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan di Cilacap, Rembang, Klaten, Semarang, Magelang, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, Batang, Karanganyar, Boyolali, Brebes, Banjarnegara.
- 8) Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Kelautan dan perikanan  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Kelautan dan perikanan dengan tersusunnya program kegiatan tahun yang akan datang sesuai prioritas dan kebutuhan serta tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan.

## **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

- 1) **Penyediaan jasa surat menyurat**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan untuk pengiriman surat ke instansi daerah maupun pusat di 35 kab./kota, Pusat (5 dirjen), 19 unit UPTD, dan Dinas Provinsi
- 2) **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana telekomunikasi, sarana air bersih, penerangan dan koneksi jaringan internet di Dinas Provinsi, dan 19 Unit UPTD.
- 3) **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pelelangan ikan di PPNP Pekalongan, PPSC Cilacap, dan Pelabuhan III Tegal.
- 4) **Asuransi Aset Dinas Kelautan dan Perikanan**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terjaminnya claim asuransi aset Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, 1 unit Mobil Sedan dan 1 unit Mobil Station
- 5) **Penyediaan Alat Tulis Kantor**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, PPP Tegal Sari, Balai Perbenihan, Satker Perbenihan, BPPI, Balai Mutu Hasil, dan Satker Lab.
- 6) **Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah lancarnya kinerja Dinas dan UPT Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, Kantor Balai, Satker Perbenihan Hasil dan PPP Tegal Sari.
- 7) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah lancarnya kinerja Dinas dan UPT Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, BPPI (Wil. Pklg, Pati, Cilacap, Kr. Jawa), PPP Tegalsari, Balai Pengujian Mutu, LPPMHP (Smg, Pklg, Clcp), Balai Perbenihan, dan Satker Perbenihan.

- 8) **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan administrasi kantor yang tertib dan lancar di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng
- 9) **Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah lancarnya operasional kantor dapat berjalan dengan baik di 5 unit Balai Perbenihan dan 12 unit Satker Perbenihan.
- 10) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan-bahan informasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng.
- 11) **Penyediaan Makan Minum**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah lancarnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- 12) **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terbinanya sinkronisasi perencanaan program kegiatan kelautan dan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, BPPI (Pklg, Clp, Pati), Balai Perbenihan, Satker Perbenihan, Satker LPPMHP (Clp, Smg, Pklg).
- 13) **Jasa Pelayanan Perkantoran**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kinerja aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

## **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

- 1) **Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya prasarana penunjang peningkatan SDM yang memadai dan nyaman di Satker Perbenihan, BBI Ngrajek, BPBAP Maribaya Tegal, BBI Muntilan, UPBAP Ambarawa, dan Guest House
- 2) **Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor**  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya prasarana gedung kantor yang memadai dan nyaman di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, Balai, dan Satker.

- 3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya prasarana transportasi yang memadai dan nyaman di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng.
- 4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana kerja yang memadai dan nyaman di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng dan UPTD Provinsi.
- 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tercapainya sarana kerja yang memadai di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng.
- 6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tercapainya sarana kerja yang memadai di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng dan UPTD Provinsi.
- 7) Pemeliharaan Alat Kedokteran  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tercapainya sarana kinerja laboratorium perikanan yang memadai di LPPMHP (Pkg, Smg, Clp).
- 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tercapainya sarana kinerja alat berat yang memadai
- 9) Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja aparatur PPP Klidang Lor Batang, LPPMHP Semarang, PPP Bajomulyo Pati, PPP Wonokerto Pekalongan
- 10) Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan UPTD  
Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya sarana prasarana dan pembinaan pengawasan, pengendalian aparatur di UPT sebanyak 92 unit

## **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**

### 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya *performance* pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

## **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini sebagai berikut :

### 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya *skill* dan pengetahuan teknis pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

### 2) Peningkatan Sumberdaya Aparatur Diskanlut

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya SDM aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang profesional dan berkualitas sebanyak 75 orang.

### 3) Peningkatan Fungsi Kehumasan Hukum dan Kelembagaan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersebarnya informasi pembangunan kelautan dan perikanan secara luas di masyarakat khususnya di Jawa Tengah.

### 4) Bintek Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerimaan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya SDM aparatur Diskanlut yang profesional dan berkualitas sebanyak 50 orang.

## **PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM**

Indikator keberhasilan masing-masing kegiatan pada Program ini sebagai berikut :

### 1) Pengelolaan dan Rehabilitasi Habitat Vital Terpadu

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas ekosistem, populasi ikan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di Kab. Pati, Rembang dan Demak.

### 2) Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Mutu Usaha Petambak Garam, meningkatnya Mutu Usaha

Perempuan Pesisir dan terwujudnya alternatif usaha taruna pesisir sebanyak 200 orang di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Pemalang, Brebes, Tegal

### **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN-KAWASAN KONSERVASI LAUT DAN HUTAN**

Indikator keberhasilan kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :

#### **1) Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut**

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas lingkungan ekosistem pesisir dan Meningkatnya produktivitas tambak di Cilacap dan Jepara

### **PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

#### **1) Pendidikan Kemasyarakatan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah untuk Meningkatnya *skill* dan pengetahuan teknis para pembudidaya, nelayan, pengolah ikan dalam pengembangan usaha mereka masing-masing: Pembudidaya (360 orang), Nelayan (85 orang), Siswa SD & SMP (1.600 anak), Masyarakat Pesisir (360 orang) dan Pengolah Ikan (330 orang).

### **KEGIATAN / ANGGARAN RUTIN**

Anggaran yang tersedia dipergunakan untuk :

#### **1) Belanja Tidak Langsung**

Indikator keberhasilannya yaitu peningkatan kinerja aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 379 orang.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Sedangkan indikator manfaat dan dampak baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Sehingga indikator manfaat dan dampak tidak kami lakukan pengukuran.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Pengukuran kinerja kegiatan, yaitu merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{prosentase pencapaian rencana kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{prosentase pencapaian rencana kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Selengkapnya realisasi dari kelompok indikator kinerja dapat dilihat pada formulir PKK (lampiran 2)

2. Pengukuran pencapaian sasaran, yaitu tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dan dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Apabila semakin tinggi realisasi pencapaian sasaran menunjukkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{prosentase pencapain rencana kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{prosentase pencapain rencana kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Tingkat capaian sasaran selengkapnya pada Formulir PPS (lampiran 3).

Perlu diingat bahwa sasaran bukan merupakan sasaran spesifik yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab salah satu unit kerja, namun pencapaiannya harus merupakan hasil kinerja kegiatan dari berbagai unit kerja - unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta seluruh *stakeholders* terkait. Dengan cara pembobotan seperti di atas dimungkinkan bahwa hasil pengukuran capaian kinerja dapat melebihi 100%.

Kategori pencapaian dari hasil pengukuran dengan cara pembobotan seperti di atas dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori Pencapaian Kinerja

Urutan	Rencana Capaian	Kategori Capaian
I	> 85	Sangat Baik
II	70 – 85	Baik
III	55 – 70	Cukup
IV	< 55	Kurang



## **B. EVALUASI KINERJA**

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs.

Dari perhitungan-perhitungan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan hasil kinerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 telah mencapai target sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah meskipun masih dijumpai kendala-kendala dan kelemahan yang memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa mendatang. Adapun hasil kinerja fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil yang dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2010

URAIAN	SASARAN / REALISASI/ PENCAPAIAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010*
<b>PERIKANAN TANGKAP</b>						
Produksi (Ton)	TARGET	234,278.63	222,031.60	233,536.84	197,766.19	199,743.85
	REALISASI	194,702.30	169,690.40	192,117.80	213,296.80	219,695.00
	PENCAPAIAN	83.11	76.43	82.26	107.85	109.99
Nilai (Rp 1.000,00)	TARGET	952.181.822,33	956.648.983,41	1.004.138.225,01	915.625.228,05	933.937.732,61
	REALISASI	866.705.262,00	885.915.494,00	1.040.366.748,00	1.264.397.039,00	1.160.720.108,00
	PENCAPAIAN	93,52	77,77	100,55	138,09	124,28
<b>PERIKANAN BUDIDAYA</b>						
Produksi (Ton)	TARGET	97,186.74	102,669.98	108,585.11	137,266.12	146,310.49
	REALISASI	101,080.90	114,007.80	128,705.80	145,015.10	170,963.05
	PENCAPAIAN	104.01	111.04	118.53	105.65	116.85
Nilai (Rp 1.000,00)	TARGET	1,111,228,264.53	1,014,140,931.31	1,103,345,037.32	1,619,486,805.38	1,684,266,277.60
	REALISASI	1,190,388,736.00	1,305,231,253.00	1,325,903,852.80	1,632,343,058.20	1,921,871,052.00
	PENCAPAIAN	107.12	128.70	120.17	100.79	114.11
<b>PERIKANAN TOTAL</b>						
Produksi (Ton)	TARGET	407,473.99	324,701.58	342,121.95	310,826.91	346,054.34
	REALISASI	295,783.20	283,698.20	320,823.60	358,311.90	390,658.05
	PENCAPAIAN	72.59	87.37	93.77	115.28	112.89
Nilai (Rp 1.000,00)	TARGET	2,657,780,954.77	1,999,508,186.92	2,107,483,262.32	2,535,112,033.42	2,618,204,010.21
	REALISASI	2,057,093,998.00	2,191,146,747.00	2,366,270,600.80	2,896,740,097.20	3,082,591,160.00
	PENCAPAIAN	77.40	109.58	112.28	114.26	117.74
<b>EKSPOR</b>						
VOLUME (Kg)	TARGET	17.868.869,27	18.226.166,62	22.036.699,11	18.701.566,28	19.655.346,16
	REALISASI	17.064.736,82	19.938.399,15	17.794.068,77	16.596.516,84	14.713.752,42
	PENCAPAIAN	95,50	109,39	80,75	88,74	74,86
NILAI (US \$)	TARGET	80.225.353,91	86.242.255,45	92.710.424,61	74.387.217,89	78.180.966,00
	REALISASI	70.614.933,33	74.643.244,22	71.762.355,41	60.124.572,18	58.996.306,03
	PENCAPAIAN	88,02	86,55	77,40	80,83	75,46
<b>KONSUMSI IKAN (kg/kapita/th)</b>						
PAD (Rp. 1.000,00)	TARGET	13,30	13,70	15,88	16,21	16,60
	REALISASI	13,76	13,32	15,05	15,23	15,57
	PENCAPAIAN	103,45	97,22	94,77	93,95	93,80
PAD (Rp. 1.000,00)	TARGET	15.100.796,000	15.000.000,000	16.135.944,000	16.148.300,000,00	5.650.295,000,00
	REALISASI	12.611.926,258	13.731.076,23	16.938.108,109	15.971.525,067,00	5.254.774,350,00
	PENCAPAIAN	83,52	91,54	104,97	98,91	93,00

Ket : 2010\*) Data Sementara

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 54 kegiatan dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja kegiatan rata-rata sebesar **99,36 %** (lampiran 4)



## KEGIATAN / ANGGARAN RUTIN

Anggaran yang tersedia dipergunakan untuk :

1) Belanja Tidak Langsung

Indikator keberhasilannya yaitu peningkatan kinerja aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 379 orang dengan capaian indikator kinerja sebesar **100,00 %**.

## C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

### 1. Keberhasilan dan Kegagalan

Dari perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dicapai realisasi nilai rata-rata inputs (masukan) adalah **96,30 %**, artinya bahwa hampir seluruh anggaran yang tersedia telah digunakan dengan **sangat baik** walaupun terdapat perubahan sistem administrasi keuangan dari manajemen proyek ke manajemen kegiatan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi adalah penyerapan keuangan tidak seperti yang direncanakan dalam rencana operasional kegiatan dan prosentase penyerapan anggaran lebih banyak tertumpuk pada akhir tahun anggaran.

Realisasi nilai rata-rata outputs (keluaran) yaitu **100%** artinya bahwa seluruh kegiatan fisik telah dilaksanakan dengan **sangat baik**. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui kendala-kendala meskipun rencana dan norma-norma teknis yang telah ditata dengan baik.

Nilai rata-rata outcomes (hasil) dari semua kegiatan adalah **101,85 %** (sangat baik). Hal ini terukur berdasarkan capaian sasaran target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, artinya meskipun pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait (swasta dan masyarakat), namun strategi dan perencanaan pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan telah tepat sebagaimana yang diharapkan meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Di bidang perikanan tangkap, terjadi penurunan produksi dan raman TPI yang disebabkan oleh penurunan produksi penangkapan ikan. Penurunan produksi ini disebabkan oleh :

- a. Kelangsungan pengelolaan perikanan di laut pada tingkat eksplotasi tinggi (*fully exploited*) dengan indikator :
  - Daerah penangkapan meluas ke selat Makasar dan Laut China Selatan.
  - Jumlah kapal pukat cincin selalu meningkat dengan penggunaan alat Bantu penangkapan berupa lampu listrik dengan kekuatan tenaga ribuan watt.

- Adanya indikator ekosistem dengan kemunculan sejumlah species dalam jumlah yang relatif banyak dalam dua tiga tahun terakhir, seperti: *Etemen*, *Mene Maculata*, dan ikan anyam-anyaman, *Aluterus monoceras*.
- b. Dampak kenaikan BBM terhadap usaha penangkapan ikan di laut yang masih belum sepenuhnya pulih. Kenaikan ini menyebabkan biaya produksi menjadi membumbung tinggi sementara harga ikan di pasar tidak mengalami kenaikan yang significant sehingga nelayan mengalami kerugian.
- c. Faktor alam yang tidak dapat diprediksi seperti cuaca dan gelombang tinggi, terbatasnya stock ikan di alam yang disebabkan oleh musim pemijahan dan ruaya (migrasi ikan).

Benefit (manfaat) dan dampak (impact) suatu kegiatan belum dapat dilihat hasilnya dalam kurun waktu yang singkat, sehingga data yang relevan, lengkap dan akurat belum bisa tersajikan pada laporan ini.

Secara umum nilai capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sangat baik (99,36%). Hal ini dilihat dari capaian berbagai indikator kinerja, baik ditinjau dari hasil kinerja bidang ekonomi (PDRB, Investasi, Perdagangan), bidang teknis (produksi, konsumsi), maupun fungsional (kawasan, KBT, dll) yang kesemuanya secara umum menunjukkan peningkatan. Capaian ini dicapai dari rata-rata 66 kegiatan yang kesemuanya mempunyai capaian di atas 85% (sangat baik).

## 2. Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang ada pada akhir tahun 2010 tersebut antara lain :

1. Terdapatnya ketidakseimbangan / disparitas tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan utara dan selatan Jawa Tengah yang disebabkan adanya ketimpangan yang besar baik sarana dan prasarana perikanan tangkap, perbenihan ikan, perikanan budidaya dan pasca panen;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai baik pada perikanan tangkap, perbenihan ikan, perikanan budidaya dan pasca panen serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan (PP), Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
3. Sumberdaya ikan yang semakin terbatas, IUU (*illegal, Unreported, Unregulated*) Fishing, ketimpangan pemanfaatan sumberdaya ikan yang menyebabkan konflik antar wilayah, nelayan;

4. Masih tingginya dominasi usaha skala kecil dengan teknologi, produktivitas dan efektifitas yang rendah;
5. Masih tingginya potensi terjadinya gempa tsunami dan gelombang pasang di wilayah pantai demikian juga potensi tanah longsor di wilayah pedalaman.
6. Pengelolaan/manajemen pembudidaya ikan yang belum mengikuti *good aquaculture practice* yang dicirikan dengan belum digunakannya teknologi yang dianjurkan, belum ramah lingkungan, dan produk yang dihasilkan berkualitas tidak baik.
7. Masih terbatasnya ketersediaan induk dan benih ikan yang bermutu.
8. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun.
9. Banyaknya pelaku usaha pengolahan hasil perikanan baik perorangan, koperasi maupun swasta masih bersifat tradisional dengan mutu produk, syarat teknis, sanitas dan higienis yang rendah dan masih jauh dari persyaratan mutu ekspor.
10. Tingginya pencemaran lingkungan pesisir/ pantai di wilayah laut Kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Kabupaten Pati, Demak, Tegal, Pekalongan dan Cilacap;
11. Meningkatnya ancaman banjir dan abrasi pantai di wilayah pesisir Kota Tegal, Pekalongan, Semarang, Kabupaten Brebes, Kendal, Demak, Pati, Rembang, Cilacap;
12. Tingginya kerusakan ekosistem *mangrove* dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di kawasan Pantai Utara dan Selatan, khususnya di Kepulauan Karimunjawa dan kawasan pantai Cilacap-Kebumen;
13. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemampuan sebagian masyarakat pesisir dalam mendayagunakan potensi sumberdaya kelautan;
14. Belum terbangunnya basis data sistem informasi sumberdaya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengawasan kegiatan eksploitasi sumberdaya kelautan secara lestari dan berkelanjutan;

### **3. Langkah-Langkah Inisiatif yang akan Diambil**

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang mendukung usaha perikanan tangkap, budidaya dan pemasaran

- hasil usaha kelautan dan perikanan di wilayah selatan Jawa Tengah
2. Melengkapi, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
  3. Penerapan pengelolaan perikanan (*fisheries management*) secara bertahap berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan berkelanjutan;
  4. Rasionalisasi, nasionalisasi, dan modernisasi armada perikanan tangkap secara bertahap dalam rangka menghidupkan industri dalam negeri dan berkepihakan kepada nelayan lokal;
  5. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena bencana alam;
  6. Pemanfaatan dan pemanenan sumberdaya akuatik secara serasi dengan lingkungan, yang mencakup metode dan praktek budidaya yang tidak berbahaya terhadap ekosistem dan sumberdayanya, memenuhi standar kebersihan yang dibutuhkan, serta praktek komersial yang menyajikan konsumen produk yang berkualitas baik.
  7. Melakukan rekayasa genetika melalui persilangan untuk menghasilkan induk dan benih yang unggul dan bermutu serta melakukan sosialisasi dan pembinaan sertifikasi benih;
  8. Memanfaatkan bahan baku (*raw material*) pakan yang mudah didapat dan mencari bahan alternatif yang murah;
  9. Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi H.A.C.C.P sebagai suatu reorientasi terhadap sistem pembinaan dan pengawasan mutu;
  10. Meminimalisasi tingkat pencemaran untuk mendukung kegiatan perikanan pada kawasan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;
  11. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan sumberdaya pesisir dan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan wilayah pesisir;
  12. Penanaman kembali hutan bakau (*mangrove*) dan penenggelaman terumbu karang buatan di daerah pantai yang telah mengalami kerusakan;
  13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan sistem agribisnis, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya alam;
  14. Membangun kapasitas kelembagaan yang handal untuk mendukung kegiatan perencanaan eksplorasi dan eksploitasi, serta pelestarian sumberdaya kelautan dan pengembangan basis data.

## D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 47.250.416.000,00 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2009 terealisasi sebesar Rp. 45.885.404.507,00 (97,26%). Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :

#### Berdasarkan Sumber Dana

Anggaran serta realisasi per kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	68.080.000	62.180.692	91,33
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik	1.192.500.000	1.159.131.463	97,20
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	62.730.000	35.063.840	55,90
4.	Jaminan Barang Milik Daerah	15.000.000	14.376.000	95,84
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	225.000.000	224.999.375	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	140.000.000	139.949.425	99,96
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	150.000.000	149.819.000	99,88
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000	205.953.000	98,07
9.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	73.959.000	98,61

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	60.000.000	52.944.225	88,24
11.	Penyediaan Makan Minum	109.200.000	80.053.000	73,31
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	1.446.960.000	1.446.959.400	100,00
13.	Jasa Pelayanan Perkantoran	1.140.974.000	1.123.095.000	98,43
14.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	75.000.000	74.973.000	99,96
15.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	350.000.000	349.766.000	99,93
16.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	460.000.000	457.466.800	99,45
17.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	99.979.300	99,98
18.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	50.000.000	49.955.000	99,91
19.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	70.000.000	69.945.450	99,92
20.	Pemeliharaan Alat Kedokteran/Lab	100.000.000	78.598.020	78,60
21.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat	100.000.000	93.663.270	93,66
22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala pontoon kendaraan di atas air	75.000.000	74.790.000	99,72
23.	Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD	1.242.583.000	1.223.434.000	98,46
24.	Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan UPT	1.517.000.000	1.513.952.600	99,80
25.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	197.820.000	195.876.000	99,02
26.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.000.000	69.590.000	99,41

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
27.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia	250.000.000	234.547.000	93,82
28.	Bintek Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan	200.000.000	193.110.500	96,56
29.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	364.666.000	363.032.000	99,55
30.	Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut	273.500.000	263.150.000	96,22
31.	Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	455.833.000	441.995.000	96,96
32.	Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan	273.500.000	269.970.000	98,71
33.	Pengendalian dan Pemulihan Sumber-daya Perikanan Tangkap	182.333.000	143.801.000	78,87
34.	Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman dan Statistik Perikanan Tangkap	273.500.000	268.093.000	98,02
35.	Revitalisasi Perikanan Tangkap	273.500.000	246.490.000	90,12
36.	Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah	332.295.000	183.415.000	55,20
37.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Tasikagung	273.500.000	268.984.000	98,35
38.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Bajomulyo	273.500.000	266.488.150	97,44
39.	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	273.500.000	268.846.000	98,30
40.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Karimunjawa	182.333.000	181.883.000	99,75
41.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Morodemak	273.500.000	271.920.000	99,42

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
42.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Tawang	273.500.000	268.793.000	98,28
43.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Klidanglor	227.917.000	225.957.000	99,14
44.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Wonokerto	273.500.000	253.227.000	92,59
45.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Asemdayong	227.917.000	227.291.000	99,73
46.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Tegalsari	273.500.000	272.605.000	99,67
47.	Pendidikan Kemasyarakatan	1.930.000.000	1.909.583.000	98,94
48.	Optimalisasi dan Pengembangan Lab. Karantina dan Kesehatan ikan	364.666.000	362.616.000	99,44
49.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	979.916.000	936.276.000	95,55
50.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	520.500.000	513.439.000	98,64
51.	Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan	1.000.000.000	962.291.000	96,23
52.	Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan	317.917.000	293.340.000	92,27
53.	Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan	273.500.000	258.362.000	94,47
54.	Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)	2.000.000.000	1.982.740.000	99,14
55.	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil	1.109.916.000	1.101.781.000	99,27

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Perikanan			
56.	Peningkatan dan Pengembangan Pekalongan LPPMHP	150.000.000	149.636.000	99,76
57.	Peningkatan dan Pengembangan Cilacap LPPMHP	150.000.000	148.942.000	99,29
58.	Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan	319.083.000	302.163.000	94,70
59.	Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan	500.000.000	494.075.000	98,82
60.	Peningkatan dan Pengembangan Semarang LPPMHP	383.751.000	366.663.000	95,55
61.	Pengembangan Kawasan Perikanan	273.500.000	270.877.000	99,04
62.	Pengembangan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program	611.666.000	606.114.000	99,09
63.	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	515.833.000	508.669.500	98,61
64.	Rintisan Pengembangan Budidaya Kepiting	250.000.000	249.429.000	99,77
65.	Pendampingan Bantuan Kapal Perikanan Tangkap	368.000.000	365.358.250	99,28
66.	Pengadaan Kendaraan Dan Prasarana Aparatur	272.810.000	269.280.000	98,71
67.	Belanja Tidak Langsung	20.224.717.000	19.569.699.247	96,76
J U M L A H		47.250.416.000	45.855.404.507	97,05

## 2. Capaian Fisik Kegiatan

Capaian rata-rata fisik kegiatan dari seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dapat dilihat tabel 5 berikut :

Tabel 5. Capaian Rata-Rata Fisik Kegiatan Anggaran APBD Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	4
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	68.080.000	100,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik	1.192.500.000	100,00
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	62.730.000	100,00
4.	Jaminan Barang Milik Daerah	15.000.000	100,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	225.000.000	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	140.000.000	100,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	150.000.000	100,00
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000	100,00
9.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	100,00
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	60.000.000	100,00
11.	Penyediaan Makan Minum	109.200.000	100,00
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	1.446.960.000	100,00
13.	Jasa Pelayanan Perkantoran	1.140.974.000	100,00
14.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	75.000.000	100,00
15.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	350.000.000	100,00
16.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	460.000.000	100,00
17.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	100,00

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	4
18.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	50.000.000	100,00
19.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	70.000.000	100,00
20.	Pemeliharaan Alat Kedokteran/Lab	100.000.000	100,00
21.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat	100.000.000	100,00
22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala ponton kendaraan di atas air	75.000.000	100,00
23.	Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD	1.242.583.000	100,00
24.	Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan UPT	1.517.000.000	100,00
25.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	197.820.000	100,00
26.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.000.000	100,00
27.	Peningkatan Sumberdaya manusia	250.000.000	100,00
28.	Bintek Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan	200.000.000	100,00
29.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	364.666.000	100,00
30.	Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut	273.500.000	100,00
31.	Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	455.833.000	100,00
32.	Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan	273.500.000	100,00
33.	Pengendalian dan Pemulihan Sumber-daya Perikanan Tangkap	182.333.000	100,00
34.	Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman dan Statistik Perikanan Tangkap	273.500.000	100,00
35.	Revitalisasi Perikanan Tangkap	273.500.000	100,00
36.	Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah	332.295.000	60,00
37.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Tasikagung	273.500.000	100,00
38.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Bajomulyo	273.500.000	100,00

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	4
39.	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	273.500.000	100,00
40.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Karimunjawa	182.333.000	100,00
41.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Morodemak	273.500.000	100,00
42.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Tawang	273.500.000	100,00
43.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Klidanglor	227.917.000	100,00
44.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Wonokerto	273.500.000	100,00
45.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Asemdayong	227.917.000	100,00
46.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Tegalsari	273.500.000	100,00
47.	Pendidikan Kemasyarakatan	1.930.000.000	100,00
48.	Optimalisasi dan Pengembangan Lab. Karantina dan Kesehatan ikan	364.666.000	100,00
49.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	979.916.000	100,00
50.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	520.500.000	100,00
51.	Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan	1.000.000.000	100,00
52.	Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan	317.917.000	100,00
53.	Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan	273.500.000	100,00
54.	Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)	2.000.000.000	100,00
55.	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	1.109.916.000	100,00

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	4
56.	Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Pekalongan	150.000.000	100,00
57.	Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap	150.000.000	100,00
58.	Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan	319.083.000	100,00
59.	Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan	500.000.000	100,00
60.	Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang	383.751.000	100,00
61.	Pengembangan Kawasan Perikanan	273.500.000	100,00
62.	Pengembangan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program	611.666.000	100,00
63.	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	515.833.000	100,00
64.	Rintisan Pengembangan Budidaya Kepiting	250.000.000	100,00
65.	Pendampingan Bantuan Kapal Perikanan Tangkap	368.000.000	100,00
66.	Pengadaan Kendaraan Dan Prasarana Aparatur	272.810.000	100,00
67.	Belanja Tidak Langsung	20.224.717.000	100,00
J U M L A H		47.250.416.000	100,00

### 3. Capaian Indikator Efisiensi

Dari kegiatan-kegiatan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hampir semua pencapaian fisiknya mencapai 100%, sedangkan pencapaian fisik kegiatan rata-rata **91,71** %. Dari seluruh kegiatan terdapat kinerja efisiensi sebesar **9,58** % karena adanya penggunaan anggaran yang lebih kecil dari pencapaian fisik, yaitu pencapaian fisik kegiatan sebesar **91,71** % dengan pencapaian anggaran **90,42**%.

Rincian efisiensi kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Efisiensi Kinerja Kegiatan Anggaran APBD Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	68.080.000	0,29
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Alam dan Listrik	1.192.500.000	0,30
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	62.730.000	2,59
4.	Jaminan Barang Milik Daerah	15.000.000	2,77
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	225.000.000	0,85
6.	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	140.000.000	2,09
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	150.000.000	0,42
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000	3,81
9.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	5,12
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	60.000.000	23,57
11.	Penyediaan Makan Minum	109.200.000	3,85
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	1.446.960.000	0,00
13.	Jasa Pelayanan Perkantoran	1.140.974.000	7,80
14.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	75.000.000	0,04
15.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	350.000.000	0,00
16.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	460.000.000	0,06
17.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	0,00

NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	
18.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	50.000.000	0,08
19.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	70.000.000	0,05
20.	Pemeliharaan Alat Kedokteran/Lab	100.000.000	0,01
21.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Besar dan Berat	100.000.000	0,04
22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala ponton kendaraan di atas air	75.000.000	1,92
23.	Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD	1.242.583.000	0,73
24.	Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan UPT	1.517.000.000	1,26
25.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	197.820.000	18,03
26.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.000.000	0,00
27.	Peningkatan Sumberdaya manusia	250.000.000	6,52
28.	Bintek Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan	200.000.000	0,00
29.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	364.666.000	9,93
30.	Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut	273.500.000	2,41
31.	Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	455.833.000	0,59
32.	Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan	273.500.000	1,50
33.	Pengendalian dan Pemulihan Sumber-daya Perikanan Tangkap	182.333.000	0,24
34.	Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman dan Statistik Perikanan Tangkap	273.500.000	1,37
35.	Revitalisasi Perikanan Tangkap	273.500.000	2,64
36.	Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah	332.295.000	2,93
37.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Tasikagung	273.500.000	0,53
38.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Bajomulyo	273.500.000	1,57
39.	Pengawasan dan Pengendalian	273.500.000	2,12



NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	
	Sumberdaya Perikanan dan Kelautan		
40.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Karimunjawa	182.333.000	0,98
41.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Morodemak	273.500.000	13,69
42.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Tawang	273.500.000	3,76
43.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Klidanglor	227.917.000	2,63
44.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Wonokerto	273.500.000	5,93
45.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Asemtoyong	227.917.000	2,23
46.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras PPP Tegalsari	273.500.000	10,07
47.	Pendidikan Kemasyarakatan	1.930.000.000	7,29
48.	Optimalisasi dan Pengembangan Lab. Karantina dan Kesehatan ikan	364.666.000	7,14
49.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	979.916.000	2,98
50.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	520.500.000	
51.	Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan	1.000.000.000	
52.	Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan	317.917.000	
53.	Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan	273.500.000	
54.	Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)	2.000.000.000	
55.	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	1.109.916.000	
56.	Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP	150.000.000	



NO.	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	%
1	2	3	
	Pekalongan		
57.	Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap	150.000.000	2,65
58.	Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan	319.083.000	6,50
59.	Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan	500.000.000	17,85
60.	Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang	383.751.000	
61.	Pengembangan Kawasan Perikanan	273.500.000	
62.	Pengembangan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program	611.666.000	
63.	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	515.833.000	
64.	Rintisan Pengembangan Budidaya Kepiting	250.000.000	0,36
65.	Pendampingan Bantuan Kapal Perikanan Tangkap	368.000.000	7,74
66.	Pengadaan Kendaraan Dan Prasarana Aparatur	272.810.000	
67.	Belanja Tidak Langsung	20.224.717.000	16,59
<b>JUMLAH</b>		<b>53.457.362.000</b>	<b>3,93</b>

## **BAB IV P E N U T U P**

### **A. KESIMPULAN**

Sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka perhitungan LAKIP dilakukan dengan menggunakan format Rencana Kinerja Tahunan (RKT), format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), dimana di dalam penyusunan LAKIP dengan sistem ini cara pengukuran kinerja diarahkan untuk mengukur kegiatan-kegiatan dalam pencapaian sasaran yang terkait, pengukuran kinerja lebih mencerminkan keterkaitan kegiatan-kegiatan secara proposional dan logis bagi pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Namun demikian dalam memberikan nilai capaian masih dijumpai adanya beberapa kendala karena tidak semua kegiatan-kegiatan dapat langsung mencapai sasaran pada tahun yang bersangkutan akan tetapi sasaran mungkin baru akan dicapai pada beberapa tahun berikutnya.

Secara global hasil pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah tahun 2009 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka pada tahun 2009 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian kualitatif sebesar **99,36%**. Hasil ini sebagian besar telah mencapai target sasaran tahun yang telah ditetapkan pada Renstra, meskipun masih dijumpai adanya beberapa kendala dan kelemahan yang masih memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa yang akan datang. Apabila ditinjau dari kategori yang diterapkan maka capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI SASARAN
1	2	3	4
Meningkatnya efektivitas system manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan (indikator sasaran : 12)	12 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing (indikator sasaran : 8)	8 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Tercapainya sarana prasarana dan pembinaan pengawasan, pengendalian aparatur di UPT (indikator sasaran : 2)	2 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dedikasi dan moral aparatur (indikator sasaran : 2)	2 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya kinerja aparatur Dinlutkan Jateng (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terselenggaranya fungsi kehumasan, hukum dan organisasi dinas (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya kinerja aparatur Diskanlut Jateng dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang



SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI SASARAN
1	2	3	4
Meningkatnya efektivitas system manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan perluasan jaringan para pembudidaya, nelayan, pengolah ikan dalam pengembangan usaha mereka masing-masing (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terwujudnya penanganan dan rehabilitasi ekosistem pesisir (indikator sasaran : 2)	2 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya mutu produk perikanan dalam rangka keamanan pangan bagi masyarakat (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terdorongnya masyarakat agar mau dan mampu memanfaatkan sumberdaya yang tersedia melalui pengembangan kawasan dan usaha agribisnis perikanan (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya efisiensi usaha perikanan sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing	4 - -	> 85 70 – 85	Sangat baik Baik Cukup



SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI SASARAN
1	2	3	4
tinggi (indikator sasaran : 4)	-	55 – 70 < 55	Kurang
Terciptanya kawasan perikanan berbasis pengembangan sumberdaya ekonomi dan agribisnis (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terwujudnya perencanaan program kegiatan unit kerja sesuai tujuan dan kebijakan (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Nelayan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya kualitas hasil tangkapan (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terwujudnya pengendalian dan pemulihan sumberdaya perikanan tangkap (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terwujudnya pengendalian dan pemulihan sumberdaya perikanan pedalaman (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	NILAI CAPAIAN (%)	KATEGORI SASARAN
1	2	3	4
Terbangun, terehabilitasi serta terpeliharanya sarana dan prasarana perikanan (indikator sasaran : 2)	2 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya kinerja satker lingkup Dinlutkan Prov. Jateng (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Meningkatnya jumlah dan mutu benih ikan (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Termanfaatkannya potensi sumberdaya perikanan baik tangkap maupun budidaya secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Terbangunnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Tersedianya Data Informasi dan Sosialisasi Penyakit Ikan (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
Berkembangnya usaha perikanan budidaya (indikator sasaran : 1)	1 - - -	> 85 70 – 85 55 – 70 < 55	Sangat baik Baik Cukup Kurang
<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>		

Dari capaian secara kumulatif sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat diraih dengan kinerja capaian "**sangat baik**", tidak ada indikator sasaran yang mempunyai nilai capaian dibawah 85%.

## **B. SARAN**

1. Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin maka ke depan perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan kegiatan perlu dilandasi integritas dan dedikasi yang tinggi dari aparat yang menangani sektor kelautan dan perikanan, baik dari tingkat provinsi maupun Kab./Kota.
2. Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan tergantung pada partisipasi seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan Jawa Tengah, maka faktor kerja sama dan koordinasi diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.
3. Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan juga tergantung dari sistem pelaksanaan pembangunan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya pembudaya ikan dan nelayan sebagai objek pembangunan kelautan dan perikanan Jawa Tengah.

## LAMPIRAN

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, atau menjawab dan merangkan kinerja instansi kepada pihak yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah.

Untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas kinerja diperlukan suatu sistem yaitu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari indikator serta mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah Instansi Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 Bagian Tata Usaha, 5 Sub Dinas, 5 Balai dan 1 Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari.

Dengan berorientasi kepada Rencana Strategik tahun 2004 – 2008 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008, maka dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan sasaran serta menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa program yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu : 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dijabarkan ke dalam 5 kegiatan; 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dijabarkan ke dalam 7 kegiatan; 3) Program Pengembangan Agribisnis, yang dijabarkan ke dalam 8 kegiatan; 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dijabarkan ke dalam 12 kegiatan; 5) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dijabarkan ke dalam 10 kegiatan; 6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dijabarkan ke dalam 2 kegiatan; 8) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 9) Program Inventarisasi dan Evaluasi

Sumberdaya Kelautan, dijabarkan ke dalam 2 kegiatan; 10) Program Pengendalian Eksplorasi dan Eksploitasi, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 11) Program Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 13) Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah, dijabarkan ke dalam 2 kegiatan; 14) Program Pengembangan Usaha Perikanan Laut, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 15) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Bidang Kelautan, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 16) Sistem Pengembangan Riset dan Teknologi Kelautan, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan; 17) Program Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan Bidang Kelautan; 18) Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dijabarkan ke dalam 1 kegiatan dan 19) Kegiatan / anggaran rutin berupa Belanja Tidak Langsung. Guna membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didukung dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. Rp. 43.305.239.000,00 dimana pada akhir Desember 2009 terealisasi sebesar Rp. Rp. 40.169.406.225,00 (92,76 %).

Dari hasil evaluasi kinerja kegiatan (sejumlah 54 kegiatan) berdasarkan rumus yang telah ditetapkan diperoleh capaian kinerja kegiatan rata-rata sebesar **99,36%**, dimana kesemua kegiatan tersebut mempunyai capaian kinerja di atas 85%.

Sebagai Dinas teknis penyumbang PAD, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi pada tahun 2009 telah mampu memberikan kontribusi PAD dari sektor Kelautan dan perikanan kepada Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.15.971.525.067,00 atau 98,91% dari target PAD yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 16.148.300.000,00. Unit-Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyumbangkan PAD yaitu : (i) Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Pekalongan, (ii) Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Cilacap, (iii) Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Pati, (iv) Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan, (v) Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan (vi) Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari.